



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS KETEPATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) YANG
DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 2005 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA)**

Oleh:

NANDA MULIAANRA

05 153 050

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Andalas*

PADANG

2010

**ANALISIS KETEPATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2005
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)**

Skripsi S1 Oleh: Nanda Muliaanra
Pembimbing: Dr. H. Yuskar, SE. MA. Ak

ABSTRAK

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketepatan penyajian laporan keuangan (Neraca) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan SAP dan kendala – kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif (studi kasus) yang dilakukan dengan menganalisis penyajian laporan keuangan (Neraca) Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan SAP. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan daftar penilaian yang berisi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SAP, dimana setiap ketentuan yang sudah diterapkan mendapat point 1 dan jika belum diterapkan mendapat point 0. Total skor akan dikonversikan ke dalam persentasi dan dibagi menurut kelas interval.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerapkan SAP dengan tepat (78%) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Neraca) Tahun 2009. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan laporan keuangan daerah yaitu sistem pencatatan dan pengolahan data yang masih manual, Sumber Daya Manusia dengan kompetensi yang terbatas, dan keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Keyword: Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, baik informasi keuangan maupun informasi lain yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Sri Dewi Wahyundaru, 2001). Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya

Sedangkan, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas berarti pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Juga merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama di bidang

administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya (Abdul Halim, 2001).

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan memerlukan informasi akuntansi salah satunya berupa laporan keuangan. Selaku pengelola dana publik maka pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itulah dituntut adanya sistem informasi yang handal.

BAB V

PENUTUP

Dalam Bab V ini akan disajikan beberapa kesimpulan dari hasil analisis data pada bab sebelumnya, serta saran-saran dalam batasan kemampuan penulis.

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan pada penyajian Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diharuskan menyajikannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini bertujuan agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terwujud.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh tingkat persentase ketepatan penyajian Laporan Neraca sesuai dengan SAP sebesar 78.13%, sehingga dapat penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mencrapkan SAP dengan Tepat dalam Laporan Neraca Tahun 2009.
3. Dalam penyajian Laporan Keuangan Daerahnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala itu terdiri dari sistem yang masih secara manual, tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia yang masih kurang, serta keterlambatan beberapa SKPD dalam menyerahkan Laporan Keuangan kepada PPKD

DAFTAR PUSTAKA

- Darman, Astika, 2008, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Guna Dharma (tidak dipublikasikan)
- Erlina, 2008, "Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah", penerbit USU Press, Medan
- Hafiz Tanjung, Abdul, 2007, "Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan)", penerbit Alfabeta, Bandung
- Halim, Abdul, 2001, "Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah", penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hartina, Silka, 2009, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat", Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi USU Medan (dipublikasikan)
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)", penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Minhar, Gilang Handika Sofia, 2009, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta", Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi STEKPI Jakarta (tidak dipublikasikan)
- Mulyadi, 2002, "Auditing", penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Nordiawan, Deddi, 2006, "Akuntansi Sektor Publik", penerbit Salemba Empat, Jakarta